

PENGARUH PENGGUNAAN APLIKASI SIPENJAGA APBD, KETERSEDIAAN ANGGARAN DAN KOMPETENSI PEGAWAI TERHADAP EFEKTIVITAS PERHITUNGAN GAJI BULANAN PEGAWAI PADA OPD PROVINSI SULAWESI BARAT

Abdul Kuddus^{*1}, Abdullah², Sylvia³

^{*1}Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

²Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

³Program Pascasarjana Magister manajemen, ITB Nobel Indonesia Makassar

E-mail: ^{*1}Kuddusnobel@gmail.com, ²abdullah@stienobel-indonesia.ac.id, ³sylviasjarlis2013@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran dan Kompetensi Pegawai terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.

Penelitian dilakukan Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat dan dilaksanakan mulai bulan Mei-Juni 2023. Populasi penelitian adalah masing-masing kepala sub bagian program dan bendahara gaji Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat dengan sampel sebanyak 74 pegawai.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara penggunaan aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran dan Kompetensi Pegawai terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai. Sedangkan secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran dan Kompetensi Pegawai terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai. Ketersediaan Anggaran merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai.

Kata kunci : Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran, Kompetensi Pegawai, dan Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan Pegawai

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of the use of the SIPENJAGA APBD Application, Budget Availability and Employee Competence on the Effectiveness of Employee Monthly Salary Calculations in OPD of West Sulawesi Province. This research approach is a quantitative approach.

The research was conducted at the OPD of West Sulawesi Province and was carried out from May to June 2023. The research population was the heads of each program sub-section and salary treasurers at the OPD of West Sulawesi Province with a sample of 74 employees.

The analysis technique used is multiple linear analysis. The results of the study show that there is a positive and significant effect partially between the use of the SIPENJAGA APBD application, Budget Availability and Employee Competence on the Effectiveness of Employee Monthly Salary Calculations. Meanwhile, simultaneously there is a positive and significant influence between the use of the APBD SIPENJAGA Application, Budget Availability and Employee Competence on the Effectiveness of Employee Monthly Salary Calculations. Budget Availability is the most dominant variable influencing the Effectiveness of Employee Monthly Salary Calculations.

Keywords: *the use of the APBD SIPENJAGA Application, Budget Availability, Employee Competence and Effectiveness of Employee Monthly Salary Calculations*

PENDAHULUAN

Anggaran merupakan alat utama pemerintah untuk melaksanakan semua kewajiban, janji, dan kebijakannya ke dalam rencana-rencana konkrit dan terintegrasi

dalam hal tindakan apa yang akan diambil, hasil apa yang akan dicapai, pada biaya berapa dan siapa yang akan membayar biaya-biaya tersebut (Dobell & Ulrich, 2002). Sementara Freeman & Shoulders (2003) menyatakan bahwa anggaran yang ditetapkan dapat dipandang sebagai suatu kontrak kinerja antara legislatif dan eksekutif. Menurut Rubin (1993), penganggaran publik adalah pencerminan dari kekuatan relatif dari berbagai budget actors yang memiliki kepentingan atau preferensi berbeda terhadap outcomes anggaran. Adanya keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah menjadi alasan mengapa penganggaran menjadi mekanisme terpenting untuk pengalokasian sumberdaya. Bagi Hagen et al. (1996), penganggaran di sektor publik merupakan suatu bargaining process antara eksekutif dan legislatif.

Penganggaran setidaknya mempunyai tiga tahapan yakni (1) perumusan proposal anggaran, (2) pengesahan proposal anggaran, dan (3) pengimplementasian anggaran yang telah ditetapkan sebagai produk hukum (Samuels, 2000). Sedangkan menurut Von Hagen (2002) penganggaran terbagi ke dalam empat tahapan, yaitu *executive planning*, *legislative approval*, *executive implementation*, dan *ex post accountability*. Pada kedua tahapan pertama terjadi interaksi antara eksekutif dan legislatif dan politik anggaran paling mendominasi, sementara pada (dua) tahap terakhir hanya melibatkan birokrasi sebagai agent.

Dalam era globalisasi yang diperlihatkan oleh adanya persaingan yang ketat dan peningkatan ekspektasi masyarakat yang tinggi, maka pihak pemerintah, di tuntut untuk lebih mengambil inisiatif dalam peningkatan perannya dalam pelaksanaan pembangunan dan lebih memberikan pelayanan kepada publik yang lebih baik, sehingga mampu menangani masalah-masalah pembangunan ekonomi, seperti; penciptaan lapangan pekerjaan dan pengurangan pengangguran, peningkatan daya beli masyarakat, dan meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan.

Dalam optimalisasi aktivitas pembangunan, suatu instansi, diperlukan suatu sistem yang dapat menjalankan aktivitas pembangunan dan menunjang pelayanan terhadap masyarakat. Untuk meningkatkan pelayanan suatu instansi terhadap masyarakat diperlukan perbaikan kinerja dari pegawai pada instansi tersebut. Di lingkungan Pemerintah Daerah, peranan pegawai baik secara individu maupun kelompok adalah sangat penting dan menentukan. Pegawai sebagai asset dan unsur utama dalam organisasi memegang peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Semua unsur sumber daya organisasi tidak akan berfungsi tanpa ditangani oleh manusia yang merupakan penggerak utama jalannya organisasi. Dalam setiap aktivitasnya haruslah tepat waktu dan dapat diterima sesuai rencana kerja yang ditetapkan atau dengan kata lain mempunyai efektivitas dan kinerja yang tinggi. Tanpa kinerja yang baik atau tinggi dari aparatur sulit bagi suatu organisasi dalam proses pencapaian tujuannya.

Penerapan otonomi daerah di Indonesia tak terlepas dari perubahan paradigma dalam pengelolaan dan penganggaran daerah. Penganggaran kinerja (performance budgeting) merupakan konsep dalam penganggaran yang menjelaskan keterkaitan antara pengalokasian sumberdaya dengan pencapaian hasil yang dapat diukur. Penganggaran berbasis kinerja mulai diterapkan di Indonesia berdasarkan PP 105/2000 dan Kepmendagri 29/2002 pada tahun anggaran 2003 atau 2004. Anggaran kinerja mendorong partisipasi dari stakeholders sehingga tujuan pencapaian hasil sesuai dengan kebutuhan publik. Legislatif diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam penyusunan dan penetapan anggaran sebagai produk hukum.

Proses penyusunan anggaran dalam penganggaran kinerja dimulai dari satuan kerja-satuan kerja yang ada di Pemerintahan. Anggaran ditetapkan sebagai suatu peraturan daerah. Anggaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi eksekutif untuk melaksanakan aktivitasnya dalam pemberian pelayanan publik dan acuan bagi legislatif untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penilaian kinerja eksekutif dalam hal pertanggungjawaban kepala daerah. Selain penganggaran prioritas pembangunan, setiap tahunnya Pemerintah Daerah menganggarkan gaji Pegawai Negeri sipil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil agar dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas. Fenomena penggajian tentu saja kerap menjadi sorotan dan perhatian, baik diantara masyarakat luas, maupun di media cetak atau elektronik, karena besaran gaji yang diberikan dirasakan kurang memenuhi unsur kehidupan layak. Gaji pegawai negeri sipil kurang kompetitif dan tidak memenuhi unsur equity. Kondisi tersebut memberikan efek kurang memotivasi pegawai untuk bekerja secara kompetitif karena variabel penggajian hanya mempertimbangkan masa kerja/ruang, selain itu tunjangan (jabatan struktural) lebih besar dari gaji pokok. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil pasal 7: yaitu : 1) Setiap pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan dan tanggungjawabnya; 2) Gaji yang diterima pegawai negeri harus mampu memacu produktifitas dan menjamin kesejahteraannya; 3) Gaji pegawai negeri yang adil dan layak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas maka sistem penggajian merupakan faktor pendukung utama dalam peningkatan motivasi kerja pegawai, karena dengan adanya pemberian gaji yang sesuai ketentuan, dibayarkan tepat waktu dan dalam jumlah yang benar sesuai dengan ketentuan. Penggajian merupakan masalah yang penting, sehingga dibutuhkan suatu sistem tentang prosedur penggajian yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian hal ini diharapkan bisa mengurangi resiko kecurangan atau penyelewengan. Gaji merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer. Umumnya gaji dibayarkan secara tetap perbulan, sedangkan upah merupakan pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan pelaksana (buruh) yang upahnya dibayarkan berdasarkan hari kerja, jam kerja, atau jumlah satuan produk yang dihasilkan karyawan. Mulyadi (2008). Gaji dan upah sangat berhubungan erat dengan karyawan atau biasa disebut dengan tenaga kerja, dimana Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Pada suatu perusahaan, dapat dikatakan bahwa tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang paling berharga karena pengetahuan dan keahlian mereka mempengaruhi kualitas barang dan jasa yang diberikan kepada para pelanggan. Tujuan utama dari karyawan dalam bekerja adalah mendapatkan gaji dan upah, gaji dan upah yang diperoleh mereka merupakan motivasi mereka dalam bekerja. Oleh karena itu, jika perusahaan tidak memberikan perhatian lebih terhadap penggajian dan pengupahan karyawan hal ini akan mengurangi motivasi mereka dalam bekerja sehingga dapat menimbulkan dampak buruk pada perusahaan. Identifikasi masalah Organisasi ini muncul karena adanya beberapa kelemahan yang ditemukan berkaitan dengan proses penganggaran belanja pegawai dalam pengalokasian gaji dan tunjangan serat tunjangan tambahan penghasilan pada Organisasi Perangkat Daerah seperti: a) OPD sering

melakukan kesalahan dalam perhitungan gaji; b) Perhitungan TPP yang berulang-ulang dan panjangnya proses persetujuan sampai dengan penerapannya; 3) Masih kurangnya SDM ASN dan operator SKPD dalam menyusun RKA/DPA yang menyebabkan SKPD sering mengajukan pergeseran anggaran; 4) Adanya asumsi legislatif bahwa eksekutif sering menyimpan anggaran pada belanja pegawai.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan kewenangan di Bidang Pendapatan, Keuangan dan Barang Milik Daerah. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, tantangan pembangunan di Bidang Pendapatan, Keuangan dan Barang Milik Daerah yang diemban oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat dalam periode 2017-2022 secara umum meliputi Optimalisasi Peningkatan PAD, Tata Kelola Keuangan dan Barang Milik Daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Disamping itu, tantangan internal untuk terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur, juga merupakan tantangan tersendiri yang penting untuk diperhatikan. Untuk terus mempertahankan opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang telah dirahi selama 7 (tujuh) tahun berturut-turut sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2021 dan Laporan capaian (Monitoring Centre for Prevention) MCP KPK tahun 2021 dengan progres keberhasilan pada perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 90,3% dengan indikator Standar Satuan Harga (SSH) sebesar 100%, Analisis Standar Biaya (ASB) sebesar 92%, Penganggaran APBD sebesar 68% dan Pengawasan 100% yang perlu terus ditingkatkan sehingga Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten melakukan peningkatan SDM dan dukungan informasi teknologi untuk meningkatkan kinerjanya.

Bidang Anggaran dan Bina Kabupaten merupakan salah satu pilar dalam mendukung tata kelola keuangan di BPKPD yang membantu dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahun dan melakukan pembinaan pengelolaan keuangan di seluruh kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat sehingga pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyusunan APBD pada tahun-tahun sebelumnya adalah perhitungan belanja pegawai dan penyusunan anggaran kas, alokasi belanja yang dianggarkan dapat diperkirakan berefek pada bisa jadi kurangnya alokasi belanja gaji yang tentunya akan merugikan ASN atau juga lebihnya belanja gaji yang tentunya berdampak pada besarnya SILPA diakhir tahun dengan memperhatikan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan belanja gaji sebesar Rp.369.395.121.297,00 dan pada Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dianggarkan belanja gaji sebesar Rp.361.514.514.385,00 atau terdapat selisih Rp.7.880.606.912,00.

Pada APBD Tahun Anggaran 2021 mengalami beberapa pergeseran yang diakibatkan belanja pegawai, namun sebagian besar pergeseran anggaran akibat kebijakan penanganan Pandemi Covid-19, penyesuaian dana transfer dan kondisi darurat akibat gempa bumi antara lain melalui :1) Peraturan Gubernur Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 26 Februari 2021 terjadi pergeseran

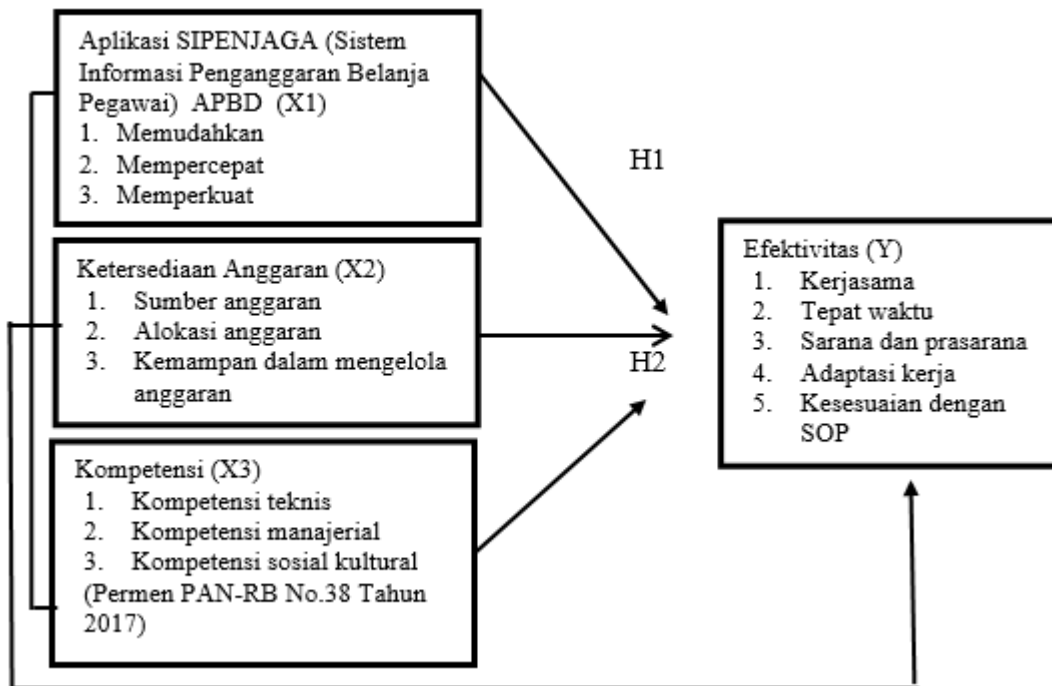
gaji dan tunjangan pada Dinas Kesehatan; 2) Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 15 Maret 2021 terjadi pergeseran gaji dan tunjangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pengembangan SDM; 3) Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 24 Maret 2021 terjadi pergeseran Tambahan Penghasilan berdasarkan Persetujuan Dirjen Bina Keuangan Daerah Nomor 900/950/Keuda; 4) Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 tanggal 21 April 2021 terjadi pergeseran gaji dan tunjangan dari rekening belanja tunjangan fungsional PNS ke rekening belanja tunjangan fungsional umum pada BAPPEDA.

Kemudian pada APBD Tahun Anggaran 2022 juga terjadi pergeseran akibat belanja pegawai antara lain melalui: 1) Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 2 Februari 2022 terjadi pergeseran gaji dan tunjangan pada RSUD, Dinas Transmigrasi, BPKPD, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, Badan Penelitian dan Pengembangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Sosial, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Satpol PP, Inspektorat, BAPPEDA, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik; 2) Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 tanggal 1 Maret 2022 terjadi pergeseran gaji dan tunjangan dan Tambahan Penghasilan pada Dinas Sosial, Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik, BKD dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Adanya pergeseran anggaran pada belanja pegawai tersebut disebabkan kurang cermatnya OPD dalam menghitung dengan baik, kepastian perhitungan akan berpengaruh atas kebijakan penyusunan APBD sehingga celah fiskal dapat dialokasikan pada program prioritas dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dijabarkan melalui Kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Disisi lain kepastian alokasi anggaran telah terpenuhi dan dapat dibayarkan tepat waktu walaupun telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 bahwa penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang sekaligus juga melatar belakangi penulis sehingga terilhami untuk menuangkan dalam sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran Dan **Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan Pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat**”

Gambar 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.
2. Diduga Ketersediaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.
3. Diduga Kompetensi Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.
4. Diduga Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran dan Kompetensi Pegawai berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.
5. Diduga Ketersediaan Anggaran merupakan variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang dilakukan pada Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat dan dilaksanakan pada bulan Mei-Juni 2023. Target populasi dalam penelitian ini adalah masing-masing kepala sub bagian program dan bendahara gaji Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat yang berjumlah 74 orang, sampel sebanyak 74 pegawai.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, koefisien determinasi (R^2).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Tabel 1. Uji Validitas Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD

Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD	<i>Pearson Correlation</i>	Kesimpulan
X1.1	0,000	Valid
X1.2	0,000	Valid
X1.3	0,000	Valid
X1.4	0,000	Valid
X1.5	0,000	Valid
X1.6	0,000	Valid
X1.7	0,000	Valid
X1.8	0,000	Valid

Sumber : Data Kuesioner diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD memiliki nilai *Pearson Correlation* sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD dinyatakan valid.

Tabel 2. Uji Validitas Ketersediaan Anggaran

Ketersediaan Anggaran	<i>Pearson Correlation</i>	Kesimpulan
X2.1	0,000	Valid
X2.2	0,000	Valid
X2.3	0,000	Valid
X2.4	0,000	Valid
X2.5	0,000	Valid
X2.6	0,000	Valid
X2.7	0,000	Valid
X2.8	0,003	Valid

Sumber : Data Kuesioner diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat dijelaskan bahwa seluruh pernyataan pada kuesioner Ketersediaan Anggaran memiliki nilai *Pearson Correlation* lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner Ketersediaan Anggaran dinyatakan valid.

Tabel 3. Uji Validitas Kompetensi Pegawai

Kompetensi Pegawai	<i>Pearson Correlation</i>	Kesimpulan
X3.1	0,000	Valid
X3.2	0,000	Valid
X3.3	0,001	Valid
X3.4	0,000	Valid
X3.5	0,000	Valid

Kompetensi Pegawai	<i>Pearson Correlation</i>	Kesimpulan
X3.6	0,000	Valid
X3.7	0,000	Valid
X3.8	0,000	Valid

Sumber : Data Kuesioner diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa semua pernyataan pada kuesioner Kompetensi Pegawai nilai *Pearson Correlation* lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner Kompetensi Pegawai dinyatakan valid.

Tabel 4. Uji validitas Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan

Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan	<i>Pearson Correlation</i>	Kesimpulan
Y1	0,000	Valid
Y2	0,000	Valid
Y3	0,000	Valid
Y4	0,000	Valid
Y5	0,000	Valid
Y6	0,000	Valid
Y7	0,000	Valid
Y8	0,000	Valid
Y9	0,000	Valid
Y10	0,000	Valid

Sumber : Data Kuesioner diolah

Berdasarkan tabel 4 dapat dijelaskan bahwa semua pernyataan pada kuesioner Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan nilai *Pearson Correlation* sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Kesimpulan
Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD	0,842	<i>Reliable</i>
Ketersediaan Anggaran	0,771	<i>Reliable</i>
Kompetensi Pegawai	0,691	<i>Reliable</i>
Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan	0,792	<i>Reliable</i>

Sumber : Data Kuesioner diolah

Berdasarkan tabel 5 dapat dijelaskan bahwa nilai *Cronbach's Alpha* variabel Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD sebesar 0,842, nilai *Cronbach's Alpha*

variabel Ketersediaan Anggaran sebesar 0,771, nilai *Cronbach's Alpha* variabel Kompetensi Pegawai sebesar 0,691 dan nilai *Cronbach's Alpha* variabel Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan sebesar 0,792. Maka dapat disimpulkan bahwa kusioner Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran, Kompetensi Pegawai dan Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan dinyatakan *reliable*.

Analisis Regresi Linear Berganda

Perhitungan statistik dalam analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS for Windows versi 23. Hasil pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapny ada pada lampiran dan selanjutnya dijelaskan pada Tabel berikut ini :

Tabel 6. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics		
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF	
(Constant)	2.109	3.328		.634	,528			
X1	.196	,098	.187	2.009	,048	,430	2.325	
X2	.681	,106	.585	6.410	,000	,449	2.226	
X3	.309	,097	,223	3.184	,002	,765	1.307	

a. Dependent Variable: EFEKTIVITAS PERHITUNGAN GAJI BULANAN

Berdasarkan tabel di atas output SPSS tersebut diatas dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 2.109 + 0,196X_1 + 0,681X_2 + 0,309X_3$$

Dari persamaan regresi linier berganda tersebut diatas, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai Konstanta (a) sebesar 2.109 dengan asumsi predictor Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD (X₁), Ketersediaan Anggaran (X₂) dan Kompetensi Pegawai (X₃) adalah 0 atau tetap maka peningkatan Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai sebesar 2.109 satuan.
- 2) Nilai Koefisien regresi X₁ sebesar 0,196 menunjukkan bahwa setiap peningkatan X₁ sebesar satu satuan, menyebabkan perubahan rata-rata total meningkatkan Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai sebesar 0,196 satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- 3) Nilai Koefisien X₂ sebesar 0,681 menunjukkan bahwa setiap peningkatan X₂ sebesar satu satuan maka akan meningkatkan Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai sebesar 0,681 satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan.
- 4) Nilai Koefisien regresi X₃ sebesar 0,309 menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel X₃ sebesar satu satuan, maka akan meningkatkan Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai sebesar 0,309 satu satuan dengan asumsi variabel lain konstan

Uji t (Secara Parsial)

Melalui output SPSS yang digunakan sebagai alat penganalisaan data dalam penelitian ini didapatkan data sebagai berikut :

1. Pengaruh penggunaan aplikasi sipenjaga APBD terhadap efektivitas perhitungan gaji bulanan pegawai

Nilai t hitung untuk variabel Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD (X1) sebesar 2.009 > t tabel 1.993, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,048 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.

2. Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai

Nilai t hitung untuk variabel Ketersediaan Anggaran (X2) sebesar 6.420 > 1.993 t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 dibawah nilai probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ketersediaan Anggaran secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.

3. Pengaruh Kompetensi Pegawai Terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai

Nilai t hitung untuk variabel Kompetensi Pegawai 3.184 > 1.993 t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.

Uji F (Secara Simultan)

Uji F dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel independent dalam hal ini adalah variable Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran dan Kompetensi Pegawai berpengaruh secara bersama sama terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai. Hasil perhitungan uji F untuk menguji hubungan variabel independen secara bersama-sama diperoleh pada Tabel berikut ini :

Tabel 7. Hasil Uji ANOVA

ANOVA ^a						
	Model	Sum Of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	797.334	3	265.778	65.868	.000 ^a
	Residual	282.450	70	4.035		
	Total	1079.784	73			
A. Dependent Variable: Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan						
B. Predictors: (Constant),Penggunaan Aplikasi Sipenjaga Apbd, Ketersediaan Anggaran Dan Kompetensi Pegawai						

Sumber :Data Diolah Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa F hitung sebesar 65.868 > F tabel 2.73, hal ini diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,000 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari taraf $\alpha = 0,05$, artinya secara simultan variabel Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran dan Kompetensi Pegawai berpengaruh terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.

Uji Beta (Dominan)

Berdasarkan hasil tabel di atas nilai “*Standardized Coefficient Beta*” diketahui bahwa variabel yang berpengaruh dominan adalah variabel Ketersediaan Anggaran dengan nilai “*Standardized Coefficient Beta*” sebesar 0,585 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menggambarkan bahwa Ketersediaan Anggaran (X2) merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas perhitungan gaji bulanan pegawai.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R square

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.859 ^a	.738	.727	2.009	2.095
a	Predictors:(Constant), Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD(X1),				
b	Ketersediaan Anggaran(X2), Kompetensi Pegawai(X3).				
	Dependent Variable : Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan (Y)				

Sumber : Data Diolah Tahun 2023

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi R.Square yang diperoleh sebesar 0.738 yang artinya besarnya kontribusi pengaruh ke 3 variabel Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD (X1), Variabel Ketersediaan Anggaran (X2) dan variabel Kompetensi Pegawai (X3) sebesar 73,8%. Sisanya, sebesar 26,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Secara Parsial

Pada bagian uji secara parsial dapat dibahas pengaruh beberapa faktor yang mempengaruhi Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat. Pembahasan masing-masing variabel tersebut dikemukakan berikut ini.

a. Pengaruh Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD Terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai pada Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat

Hasil analisis terhadap pengaruh Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan PNS Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,048 < 0,05, maka disimpulkan H1 diterima, artinya Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai.

SIPENJAGA (Sistem Informasi Penganggaran Belanja Pegawai) APBD ini dapat menjadi kontribusi secara optimal dalam meningkatkan kinerja BPKPD khususnya bidang anggaran yang memudahkan dalam pengintegrasian dengan SIPD dan tentunya menjadi refrensi pengembangan kedepan dapat digunakan oleh seluruh Kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat dan bahkan dapat dimanfaatkan seluruh Pemerintah Daerah se Indonesia nantinya.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahdien Badu Alam (2022) dengan judul Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal (Studi Pada Hotel Di Kabupaten Lombok Tengah).

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andi Annisa Purnamasari (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Penggajian Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Pembayaran Gaji Karyawan PT. Pos Indonesia (Persero) Pusat Kota Makassar.

b. Pengaruh Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai pada Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat

Hasil analisis terhadap pengaruh Ketersediaan Anggaran terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan PNS Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, maka disimpulkan H2 diterima, artinya Ketersediaan Anggaran berpengaruh positif terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai.

Menurut Governmental Accounting Standards Board (GASB), definisi anggaran (budgeting) adalah rencana operasi keuangan, yang mencakup estimasi pengeluaran yang disusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Perencanaan dalam penyiapan anggaran sangatlah penting, karena dengan adanya anggaran dalam organisasi dapat memberi gambaran jelas tentang organisasi sektor publik di masa mendatang. Untuk menilai kinerja pimpinan organisasi sektor publik juga dapat dengan menggunakan anggaran. (Sujarweni, 2020)

Pada penelitian ini variabel Ketersediaan Anggaran berpengaruh terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan Pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Verawaty Pandelin Lubis (2022) dengan judul penelitian Pengaruh Pengendalian Anggaran Penjualan, Anggaran Biaya Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Carrefour Medan Citra.

c. Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan PNS pada Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat

Hasil analisis terhadap pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$, maka disimpulkan H3 diterima, artinya Kompetensi Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai.

Gultom (2019) menyatakan bahwa kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk di antaranya kemampuan seseorang untuk mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut dalam situasi yang terbaru dan meningkatkan manfaat yang disepakati.

Pada penelitian ini Kompetensi Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan Pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asep Effendi (2018) dengan judul penelitian Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kompetensi Terhadap Efektivitas Penggajian.

Pengaruh Penggunaan Aplikasi Sipenjaga APBD, Ketersediaan Anggaran Dan Kompetensi Pegawai Secara Simultan Terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan Pegawai Pada Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan (uji F), dimaksudkan untuk mengetahui apakah variabel Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran dan Kompetensi Pegawai secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan Pegawai. dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat diketahui bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan antara variabel Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran dan Kompetensi Pegawai terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai.

Sebuah usaha untuk mendapatkan tujuan, hasil atau target yang diharapkan dengan waktu yang telah ditetapkan terlebih dahulu tanpa memperdulikan biaya yang harus atau sudah dikeluarkan dinyatakan efektif. Di mana suatu organisasi dinyatakan efektif jika didalamnya terdapat tiga dimesni yaitu: dimensi teknis, dimensi konsep dan dimensi manusia. Organisasi tidak sekedar wadah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan akan tetapi juga merupakan mekanisme yang berlangsung dalam proses kerja sama itu. Oleh karena itu maka organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi yang berhasil bagi pencapaian tujuan apabila ternyata memungkinkan terwujudnya kerja sama yang efektif dalam melaksanakan volume dan beban kerja organisasi tersebut.

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Kurniawan (2005), menjelaskan jika efektivitas merupakan kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Menurut Effendy (2008) mendefinisikan efektivitas sebagai Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan.

Ketersediaan Anggaran Merupakan Variabel Yang Paling Dominan Berpengaruh Terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan Pegawai Pada Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan hasil uji Beta (uji Dominan), dimaksudkan untuk mengetahui variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan Pegawai. Ketersediaan Anggaran merupakan variabel yang paling dominan dengan nilai "*Standardized Coefficien Beta*" sebesar 0,585..

Dalam akuntansi pemerintah sudah lazim dikenal istilah belanja (expenditure). Belanja adalah sebuah pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan istilah yang digunakan untuk pengeluaran pada laporan Realisasi Anggaran (Siregar, 2017).

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk dapat mengurus dan mengatur keuangannya sendiri dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain (Khusaini, 2018) :

1. Akuntabilitas

Dalam prinsip akuntabilitas, pengambilan suatu keputusan sesuai dengan mandat yang diterima. Kebijakan harus dapat diakses dan dipertanggungjawabkan.

2. **Transparansi**
Dalam prinsip transparansi, diperlukan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diawasi oleh DPRD dan masyarakat.
3. **Kejujuran**
Dalam keuangan publik harus pengelolaannya, dipercayakan kepada pengelola yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.
4. **Value for Money.**
Prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan memperhatikan ekonomis, efektivitas, dan efisiensi
5. **Pengendalian**
Dalam prinsip pengendalian, dilakukan monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran APBD.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan oleh peneliti terhadap pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan Pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.
2. Ketersediaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.
3. Kompetensi Pegawai berpengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.
4. Penggunaan Aplikasi SIPENJAGA APBD, Ketersediaan Anggaran dan Kompetensi Pegawai berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.
5. Ketersediaan Anggaran berpengaruh paling dominan terhadap Efektivitas Perhitungan Gaji Bulanan pegawai Pada OPD Provinsi Sulawesi Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. (2011). Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta. Penerbit Graha Ilmu.
- Agung, Kurniawan. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta. Penerbit Pembaharuan.
- Danim, Sudarwan. (2012). Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok, Edisi 2. Jakarta. PT Rineka Cipta Utama.
- Darsil, Munir. (2004). Analisis Transformasi Struktural dan Basis Ekonomi Daerah di Kabuapten Karanganyar. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan UNS, Juli. Vol 1, No. 1, hal. 15-27.
- Dobell, Peter., & Martin, Ulrich. (2002). Parliament's Performance In The Budget Process: A Case Study. Policy Matters 3(2):1-24.
- Effendy, Onong Uchjana. 2008. Dinamika Komunikasi. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.

- Firman, A., & Karmansyah, K. (2020). Kontribusi Wisata Hutan Mangrove Tongke-Tongke Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata Kabupaten Sinjai. *Akmen Jurnal Ilmiah*, 17(1), 163-171.
- Freeman, R. J., dan C. D. Shoulders. (2003). *Governmental and Nonprofit Accounting - Theory and Practice*. Seventh edition. New Jersey. Prentice Hall.
- Hagen, J.V. (2002). Fiscal rules, fiscal institutions, and fiscal performance. *The Economic and Social review* 33(3): 263-284.
- Hasibuan, Malayu. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. PT Bumi Aksara.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- Latief, F., Dwinanda, G., Aqila, N., & Fajri, M. (2024). Apakah Kompetensi, Budaya Organisasi dan Disiplin Mampu Meningkatkan Kinerja Karyawan?. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 262-271.
- Mahsun, Mohamad. (2016). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta. BPFE.
- Moleong, Lexy, J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan ke-36. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyadi. (2013). *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Mulyadi. (2008). *Sistem Akuntansi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Rubin, D. (1993). *A Practical Approach to Teaching Reading*. Boston, Allyn and Bacon.
- Soemarso, S.R. (2014). *Akuntansi Suatu Pengantar*. Edisi Kelima. Buku 2. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta, CV.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara